

KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA YOGYAKARTA

INTISARI

Oleh:

Galih Dewantoro Tri Kusumo*, Supriyadi**

Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan non penal yang telah dilakukan oleh institusi terkait dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah menengah atas serta untuk mengkaji dan merumuskan kebijakan non penal yang ideal dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah menengah atas di masa mendatang.

Metode penelitian dalam tesis ini bersifat normatif, empiris, dan preskriptif. Bersifat normatif karena menggunakan data sekunder untuk meneliti kaidah atau norma, bersifat empiris karena menggunakan data primer untuk menggambarkan efektivitas kebijakan non penal yang dilakukan oleh berbagai pihak sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah menengah atas, serta bersifat preskriptif karena diharapkan mampu memberikan pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan kebijakan non penal dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan narkotika di lingkungan SMA di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh dua kesimpulan. Kesimpulan pertama menyatakan bahwa kebijakan non penal dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah menengah atas di Kota Yogyakarta dilakukan oleh Polresta Yogyakarta, BNNP Yogyakarta, dan Satgas Anti Narkoba di lima sekolah menengah atas di Kota Yogyakarta. Pelaksanaan kebijakan non penal diwujudkan dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi terhadap pelajar dan masyarakat, pemasangan himbauan anti narkotika, pelaksanaan razia dan patroli di tempat yang terindikasi rawan, diseminasi informasi, advokasi kebijakan anti penyalahgunaan narkotika, maupun *training of trainer*. Kesimpulan kedua menyatakan bahwa kebijakan non penal yang ideal dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah menengah atas di masa mendatang dapat diwujudkan dalam bentuk pembentukan kurikulum pembelajaran mengenai narkotika serta peningkatan peran sekolah dan guru dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, peningkatan kompetensi dan jumlah pegawai BNNP DIY, dan peningkatan peran keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh pelajar SMA.

Kata kunci: *Kebijakan Non Penal, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Sekolah Menengah Atas.*

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

** Dosen Departemen Hukum Pidana, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

**NON PENAL POLICY IN OVERCOMING NARCOTICS
ABUSE IN YOGYAKARTA CITY'S SENIOR HIGH
SCHOOL ENVIRONMENT
ABSTRACT**

By:

Galih Dewantoro Tri Kusumo*, Supriyadi**

The purpose of this thesis research is to identify and analyze non-penal policies that have been carried out by related institutions in overcoming narcotics abuse in high school environments and to study and formulate ideal non-penal policies in tackling narcotics abuse in high school environments in the future.

The research methods in this thesis are normative, empirical, and prescriptive. It is normative because using secondary data to examine rules or norms, is empirical because it uses primary data to describe the effectiveness of non-penal policies carried out by various parties as an effort to prevent narcotics abuse in high school environments, and is prescriptive because it is hoped that they will be able to provide guidelines that can be used as a reference for the implementation of non-penal policies in the context of tackling narcotics abuse in high school environments in the future.

Based on the results of the research and analysis that has been done, two conclusions are obtained. The first conclusion states that the non-penal policy in tackling narcotics abuse in high schools in Yogyakarta City is carried out by the Polresta Yogyakarta, BNNP Yogyakarta, and the Anti Narcotics Task Force in five high schools in Yogyakarta City. The implementation of non-penal policies is manifested in the form of guidance and outreach to students and the community, installing anti-narcotics appeals, conducting raids and patrols in places that are indicated to be vulnerable, disseminating information, advocating for policies on anti-narcotics abuse, and training of trainers. The second conclusion states that the ideal non-penal policy in tackling drug abuse in high school environments in the future can be realized in the form of the formation of a learning curriculum on narcotics and increasing the role of schools and teachers in efforts to prevent narcotics abuse, increasing in the competence and number of BNNP DIY employees, and increasing the role of the family in preventing narcotics abuse by high school students.

Keywords: *Non Penal Policy, Overcoming Narcotics Abuse, Senior High School.*

* Student of the Master of Law Study Program, Faculty of Law, Gadjah Mada University.

** Lecturer of Criminal Law Department, Master of Law Study Program, Faculty of Law, Gadjah Mada University.